

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembuatan pelaporan keuangan saat ini yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai sistem pelaporan dalam bentuk aplikasi *software*. Laporan keuangan dapat memberikan kegunaan sepenuhnya kepada pihak yang membutuhkan informasi atas suatu keputusan dari setiap kegiatan yang terjadi pada waktu yang akan datang. Karakteristik laporan keuangan harus transparansi/akuntabel, jujur (tidak ada rekayasa), dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan terhadap semua data yang diinformasikan. Sehingga laporan keuangan itu dapat menarik perhatian bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan dapat berkontribusi dalam pengembangan usaha yang dikelolanya. Laporan keuangan itu juga harus dapat dibuktikan kebenarannya melalui pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas sebagai pemeriksa atau audit secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Akuntabilitas sektor publik yang lebih baik bisa terwujud melalui adanya laporan keuangan organisasi sektor publik yang merupakan bagian yang sangat penting. Adapun tuntutan yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan akuntansi publik dapat menimbulkan dampak pelaksanaan bagi manajemen sektor publik kepada publik untuk memberikan informasi yang akurat. Laporan keuangan yang memiliki kualitas adalah hasil dari informasi akuntansi. Lembaga-lembaga sektor publik juga mendapatkan tuntutan yang semakin tinggi dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas seiring dengan perkembangan akuntansi dalam sektor publik yang semakin pesat.²

² Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance Jurnal Akuntansi Pemerintah*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 1- 17.

Pelaporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan data dan informasi yang berguna bagi mereka yang mengeluarkan keputusan untuk melakukan investasi dan pembiayaan, membantu dalam memperkirakan arus kas di waktu yang akan datang, mengidentifikasi sumber daya ekonomi (aset), klaim atas sumber daya tersebut (kewajiban) serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut.³ Titik pencapaian kepercayaan akan diperoleh dengan laporan yang masih membutuhkan pengujian atau disaksikan lagi oleh unsur terkait yang dianggap independen, bebas, tidak memihak dengan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang disebut audit dan general audit. Akuntan yang diberi tugas sebagai pemeriksa akan menyampaikan laporan tentang hasil pemeriksaannya apakah laporan yang dibuat manajemen tadi wajar atau tidak, atau terdapat sesuatu pos yang tidak wajar atau sama sekali tidak wajar. Opini hasil pemeriksaan laporan keuangan ada 4 jenis, yaitu: opini wajar (*unqualified*), opini wajar dengan syarat (*qualified*), opini tidak wajar, dan tidak opini. Keempat opini tersebut diberikan dengan berdasarkan kepada sampai di mana laporan keuangan menaati prinsip akuntansi (standar akuntansi), pengungkapan, konsistensi, dan syarat-syarat lainnya.⁴

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berlaku untuk amil yang menerima dan mendistribusikan zakat dan infaq/sedekah.⁵ Pegawai yang menerima dan mendistribusikan zakat dan infaq/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah.⁶ Bagian laporan keuangan yang lengkap dari pegawai meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁷

³ Jerry J. Weygandt et.al., *Pengantar Akuntansi 2 Berbasis IFRS*, terjemahan oleh Miqdad Zuhdy Azra, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), Edisi 2, 262

⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), Edisi 1, Cetakan ketiga, 126.

⁵ Wibisana dkk, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah*, (Jakarta: DSAK IAI, 2008), Paragraf 2, 109.1

⁶ Wibisana dkk, *Pernyataan*, Paragraf 3, 109.1

⁷ Wibisana dkk, *Pernyataan*, Lampiran, 109.10

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan salah satu pernyataan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh konsep dasar pelaporan sebagai penghubung antara pedoman pelaksanaan dengan tujuan pelaporan yang akan dicapai.⁸ Dan hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya meskipun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak sesuai akan tetapi telah menerapkan PSAK 109. Ketidaksesuaian tersebut mulai dari pengakuan yang tidak mengacu pada PSAK 109, seperti pengakuan dana non halal, pemisahan antara kas dana zakat, infaq, dan sedekah, kurangnya kebijakan terkait dengan pengungkapan dana zakat, infaq, dan sedekah, serta kurang lengkapnya penyajian laporan keuangan yaitu tidak adanya laporan perubahan dana non halal.⁹

Muhammad Husen menyatakan bahwa *Islamic Financial Services Board* (IFSB) telah mengemukakan dalam tinjauan hukum keuangan Islam, tata kelola berbasis prinsip syari'ah wajib diimplementasikan untuk memastikan prinsip syari'ah telah dipatuhi. Tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap sesama manusia, namun pada akhirnya pertanggungjawaban kepada Allah yang disebut dengan konsep *governance*¹⁰

Terkait PSAK syari'ah di atas, ajaran Islam telah memerintahkan dengan jelas mengenai keharusan melaksanakan akuntansi pembukuan dengan teliti, benar, dan bertanggung jawab dalam segala bentuk kegiatan muamalah dan sebaliknya melarang pembukuan yang penuh dengan rekayasa, *mark up*, dan korupsi. Konsep dan penjabaran tentang akuntansi berbasis syari'ah ini berlandaskan pada firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah, 2: 282:

⁸ Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 80-82. Lihat juga Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), 9-10.

⁹ Rokib, Ahmad, Wisandani, Iwan. Murhasanah, Elis, "Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Taraadin*, Vol. 1, No. 2, Maret 2021, 99-109

¹⁰ Lastuti Abubakar dan Handayani, "Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah", *Jurnal Law and Justice, Fakultas Hukum Unpad* Vol. 2, 2. 2017, 124-134

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

“Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya...”¹¹

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan utang piutang maksudnya muamalat seperti jual-beli, sewa menyewa, utang-piutang, dan lain-lain secara tidak tunai misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang tidak ditentukan atau diketahui, maka hendaklah kamu tuliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Dan hendaklah ditulis surat utang itu di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Dan janganlah merasa enggan atau berkeberatan penulis itu untuk menuliskannya jika ia diminta, sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya artinya telah di beri-Nya karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya...¹²

Sebab turunnya ayat Al-Quran di atas, yaitu pada saat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Maka dari itu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: ”Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdilllah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas).¹³ Sehubungan dengan itu Allah *Subhanahu wata’ala* menurunkan surat Al-Baqarah ayat ke-282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu

¹¹ Agus Hidayatulloh, dkk, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI*, (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2019), Cetakan Keenam, 48

¹² Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Ayat*, “Terjemah oleh” Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet. 17, 162

¹³ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Alquran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), Jilid I, 136.

tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Hendaklah yang menuliskannya itu seseorang yang memiliki pengetahuan dan kecakapan (profesional) agar terhindar dari kekeliruan atau kesalahan.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia sudah memiliki regulasi pengelolaan keuangan, seperti ditetapkannya PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan yang terbaru telah dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat pada 25 November 2011, ternyata belum dapat sepenuhnya memberikan keyakinan terhadap masyarakat bahwa pengelolaan keuangan LAZ dan BAZ sudah dilakukan dengan standar yang semestinya. Ikatan Akuntan Indonesia yang berfungsi sebagai pemegang kebijakan dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia, pada akhir tahun 2007 sebenarnya telah mengkaji tentang PSAK yang khusus membahas lembaga amil zakat, yaitu PSAK 109. Setelah melalui dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait dengan zakat dan proses pengesahan PSAK 109 yang menyita waktu yang cukup lama tidak lepas dari adanya pendapat di kalangan ulama yang berbeda-beda tentang zakat. Akibatnya fatwa yang dibutuhkan IAI dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengesahkan PSAK ini mengalami keterlambatan. Secara resmi PSAK 109 terbit mulai tanggal 6 April 2010 dan PSAK 109 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Ditambah dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta PA-OPZ 2005 yang diterbitkan Forum Zakat dan beberapa fatwa MUI, maka pengaturannya akan lebih baik lagi.¹⁴

Kemudian, faktor kedua yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan itu adalah sistem informasi akuntansi. "Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan yang terintegrasi dari sub-sub sistem/bagian baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang

¹⁴ Yulifa Puspitasari dan Habiburrochman, *Penerapan PSAK 109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela*, "Jurnal Akuntansi Multiparadigma," Vol. 4 No. 3, Desember 2013, 479-474.

berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”.¹⁵ Faktor sistem informasi akuntansi dikatakan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi yang menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁶

Agar informasi keuangan lebih akurat, benar dan dapat dipercaya, maka informasi keuangan tersebut harus diuji oleh pihak yang independen (akuntan publik). Auditor sebagai *at-test function*, harus bersikap dan bertindak dengan adil, independen, dan obyektif memeriksa dan menilai laporan keuangan yang disajikan, sebagaimana firman Allah SWT. QS. An-Nisa, 4: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الهُوَىٰ إِن تَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Terjemahan ayat di atas dalam tafsir Jalalain, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak atau benar-benar tegak dengan keadilan, menjadi saksi terhadap kebenaran karena Allah, walaupun kesaksian itu terhadap dirimu sendiri maka menjadi saksi dengan mengakui kebenaran dan janganlah kamu menyembunyikannya atau terhadap kedua ibu bapak dan

¹⁵ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72

¹⁶ Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 11, No. 2 Januari 2020, 170-178

¹⁷ Hidayatulloh, dkk, *Mushaf*, 100

kaum kerabatmu. Jika ia maksudnya orang yang disaksikan itu kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya daripada kamu, dan lebih tahu kemaslahatan mereka. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih, misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya untuk mengambil muka, atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya agar tidak berlaku adil atau menyeleweng dari kebenaran. Dan jika kamu mengubah atau memutarbalikkan kesaksian atau berpaling artinya enggan untuk memenuhinya maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan hingga akan diberi-Nya balasannya.”¹⁸

Hadits Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا ، وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. (متفق عليه)

Dari Ibnu Mas’ud r.a. dari Nabi Saw, bersabda: Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. (*Mutafaq ‘alaih*)¹⁹

Terkait uraian tentang penerapan PSAK syari’ah dan sistem informasi akuntansi, di atas, jadi laporan keuangan BAZNAS disebut relevan apabila memuat informasi yang di dalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga dapat berpengaruh terhadap lahirnya keputusan dari pengguna, khusus dalam mengevaluasi peristiwa waktu yang lalu atau masa kini, memprediksi masa yang akan datang, serta menegaskan atau dapat mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang andal dalam laporan keuangan BAZNAS berarti bebas dari

¹⁸ Al-Mahalli dan As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 395

¹⁹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ wal Marjan)*, Terjemah oleh Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2017), 978

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kejadian secara jujur, serta dapat diperiksa. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika bisa dibandingkan dengan laporan keuangan *entitas* pelaporan lain pada umumnya. laporan keuangan BAZNAS dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya.

Faktor yang ketiga dari kualitas laporan keuangan itu adalah sistem pengendalian internal. “Sistem pengendalian intern merupakan proses yang terintegrasi dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk menghasilkan keyakinan dan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi atau lembaga dengan keandalan pelaporan keuangan, kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan harta negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.²⁰

Pengendalian internal yang tertata dengan baik harus dimiliki oleh setiap organisasi atau lembaga. Peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan karyawan lainnya yang berbeda merupakan prinsip sistem pengendalian intern. Pengecekan independen atau pemeriksaan internal bertujuan untuk memperoleh kegunaan yang maksimal, maka:

1. Harus melakukan secara berkala/periodik atau bisa juga dilakukan secara mendadak.
2. Harus dilakukan oleh orang yang independen/tidak terikat dengan lembaga tersebut.
3. Ketidakcocokan/kesesuaian seharusnya dilaporkan ke tingkat manajemen yang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat.²¹

Faktor pengendalian internal dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu entitas, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Marisa Eka Pangestu, dkk yang menyatakan Kualitas Sumber Daya Manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap

²⁰ Mahmudi. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 20.

²¹ Herry, *Controllershship: Knowledge and management Approach*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2014), 135.

kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.²²

Sistem pengendalian internal yang semakin ketat merupakan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional lebih dipacu agar ke depannya dapat menghasilkan hasil pemeriksaan opini wajar tanpa pengecualian secara konsisten setiap periode. Opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh artinya laporan keuangan tersebut bisa dipercaya digunakan sebagai alat pengambil keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Mengenai keharusan pelaksanaan pengendalian internal, Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-‘Asr, 103: 1-3:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
هَلَّا وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ء

“Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”²³

Makna yang terkandung pada ayat di atas, di antaranya bahwa sebuah pengendalian tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa norma dan etika yang jelas. Norma dan etika itu tidak bersifat hanya individual, tetapi harus disepakati dan dijalankan bersama dengan prosedur yang jelas pula. Sebagai contoh, disepakati bahwa semua pegawai masuk kantor pukul 08.00 WIB dan keluar kantor pukul 17.00 WIB. Pada umumnya, seseorang manusia sering mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu penting dilakukan saling berwasiat yang berulang-ulang, konsisten dengan kesabaran. Adapun tujuan melakukan pengendalian internal adalah mencegah seseorang terjerumus pada sesuatu yang salah atau kerugian. Tujuan lainnya adalah agar kualitas pribadi dan kehidupan terus meningkat.

²² Marisa Eka Pangestu, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Arif Hartono, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo”, *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2019, 108-119

²³ Hidayatulloh, dkk, *Mushaf*, 601

Faktor keempat yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan adalah kinerja pegawai. Faktor yang dapat mendorong karyawan agar memiliki kinerja yang baik yaitu: *personal factors* ditentukan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, komitmen individu, *leadership factors* ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan manajer, *team factors* ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan rekan kerja, *system factors*, ditunjukkan adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi, *contextual/situational factors*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal eksternal.²⁴

Sumber daya manusia yang memiliki kualitas juga bisa menghemat waktu dalam pembuatan laporan keuangan karena SDM tersebut telah mengetahui dan memahami hal yang harus dikerjakan dengan baik dan sesuai bidang tugasnya agar dalam penyajian laporan keuangan dapat selesai tepat waktu. Semakin cepat penyelesaian penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk segera mengambil keputusan.²⁵ Penelitian terkait dengan faktor kinerja seperti hasil penelitian Reny Aziatul Pebriani yang menyatakan kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran Audit Internal secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.²⁶

Ajaran Islam menganjurkan kita untuk mencegah perilaku yang menyimpang (*nahy munkar*), tetapi juga kita didorong untuk melakukan perilaku yang baik (*amar ma 'rūf*) dengan menciptakan lingkungan yang kondusif melalui pendidikan yang efektif, perubahan politik, sosial, hukum, dan ekonomi serta pendirian lembaga-lembaga yang dibutuhkan. Pemerintah akan gagal menjalankan tugas ini, jika ia tidak memiliki akuntabilitas di hadapan

²⁴ Michael Armstrong dan Angela Baron, *Performance Management : The New Realities*, dalam Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 5, Cet. 11, 84.

²⁵ Roshanti, A., Sujana, E., & Sinarwati, K. "Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah", *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 2014, 1-12

²⁶ Reny Aziatul Pebriani, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol. 10 No. 1, Juli 2019, 55-62

masyarakat, tidak menegakkan hukum secara adil, dan tidak memiliki staf yang kompeten.²⁷

Pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan aspek pembuatan keputusan, dengan menggunakan zakat sebagai bagian utama dari pelaporan keuangan maka dapat menghindari perbedaan kepentingan antara berbagai pihak sebagai pengguna laporan keuangan. Di samping itu dapat menghindari berbagai praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan, seperti penyajian informasi yang menyesatkan pengguna laporan. Untuk memperoleh predikat laporan keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian maka diperlukan sumber daya manusia yang cakap yang merupakan karakteristik dasar seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu sebagai pegawai dalam bidang pekerjaannya. Langkah yang harus didahulukan dan dipandang terbaik yang sebaiknya harus kita lakukan, baik sebagai pekerja, pebisnis, maupun sebagai pribadi, adalah melakukan penilaian terhadap diri sendiri (*self-assesment*). Penilaian kinerja diri, baik sebagai hamba maupun sebagai pekerja harus dilakukan karena Allah menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Allah SWT. berfirman dalam QS. At-Taubah, 9: 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²⁸

Dari uraian kinerja pegawai di atas, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dibutuhkan aktivitas kerja manajemen dan para pegawai yang benar-benar memahami standar akuntansi keuangan,

²⁷ Ibnu Khaldun (d.808AH/1406AC), *Muqadimah*, (Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra, n.d), 235-43, dalam M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*, terjemah oleh Ikhwan A. Basri, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 40.

²⁸ Hidayatulloh, dkk, *Mushaf*, 203

standar akuntansi keuangan syari'ah, menguasai sistem dan teknologi informasi, bekerja secara perorangan maupun tim yang teratur dan konsisten terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta mampu meningkatkan prestasi kerja masing-masing untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pemerintah non struktural yang memiliki sifat kemandirian dan bertanggungjawab kepada Pemerintah melalui Menteri Agama disebut Badan Amil Zakat Nasional. Untuk mengatur tentang Pengelolaan Zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diwajibkan menyampaikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun sesuai dengan tingkatannya maka diterbitkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011.²⁹

Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Masa Kerja 2016-2021 dengan SK Bupati Garut Nomor: 451.12/Kep.566-Adkesra/2016. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan merupakan penyempurna Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan berakhirnya masa jabatan pengurus BAZNAS Kab. Garut Periode 2010-2013 dan berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 351/BP/BAZNAS/IX/2016 tanggal 19 September 2016. Maka pelantikan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Periode 2016-2021 dilakukan Bupati, yang ditetapkan di Garut pada tanggal 05 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Bapak Bupati Garut H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., MP.³⁰

Secara kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sedangkan tentang kepengurusannya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor:

²⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata Kerja Unit Pengumpul Zakat*, Bab VIII, Pasal 48

³⁰ <https://baznas.garutkab.go.id>, *Sejarah Pengelolaan Zakat Kabupaten Garut*, diakses 10 Agustus 2021

451.12/Kep.566-Adkesra/2016 perihal Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Masa Kerja 2016-2021.³¹

Tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
2. Melakukan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
3. Melakukan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
4. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Garut.
5. Melaksanakan pemberian rekomendasi pada izin pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berskala Kabupaten. UPZ tersebut terdiri dari: UPZ Kecamatan, UPZ Desa/Kelurahan, UPZ Instansi/Lembaga, dan UPZ Lainnya sesuai kebutuhan.³²

Berikut hasil wawancara yang dilakukan, bahwa dalam pengelolaan zakat yang mencakup upaya penyajian laporan keuangan yang berkualitas secara konsisten tentu berkaitan dengan penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kinerja pegawai yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Garut yang dibantu oleh UPZ masing-masing tingkatan di bawahnya. PSAK 109 diterapkan menggantikan PSAK 101 yang pengelolaannya ditangani oleh Kepala Bidang Keuangan dibantu oleh Staf Bidang SDM dan Umum. Tugas pokoknya adalah menyusun dan menyajikan laporan keuangan, membangun sistem informasi akuntansi melalui komunikasi yang baik dan terjaga yang didukung fasilitas kemajuan teknologi sebagai penghubung sistem informasi kepada berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat, terutama dalam pelaporan pengelolaan keuangan. Pengendalian internal yang dilakukan secara berkala oleh para

³¹ <https://baznas.garutkab.go.id>, *Program Baznas Kabupaten Garut*, diakses 10 Agustus 2021

³² <https://baznas.garutkab.go.id>, *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi*, diakses 10 Agustus 2021

Kepala Bidang masing-masing terhadap seluruh pegawai dan pengawasan yang melekat dari pimpinan terhadap Kepala Bidang. Kinerja pegawai terus mendapat perhatian yang serius dari seluruh pegawai. Pimpinan terus mengadakan bimbingan teknis pengelolaan zakat yang dilakukan secara bertahap, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan zakat dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan memperoleh penilaian WTP dari akuntan publik. BAZNAS Kabupaten Garut menerapkan sistem laporan terbuka atau laporan yang dipublikasikan untuk diketahui secara umum. Sistem laporan terbuka ini diterapkan dengan harapan tidak adanya kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat. Pemberitahuan secara umum sangat diperlukan, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Peraturan daerah yang didukung dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media masa seperti, radio, surat kabar, buletin, internet dan lain-lain.³³

Pentingnya konsistensi kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut yang baik, akuntabel, transparansi, apalagi informasi kepada masyarakat tentang laporan pengelolaan zakat yang belum disosialisasikan secara menyeluruh, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan zakat. Kekhawatiran yang masih terjadi di masyarakat bahwa zakat yang telah dititipkan kepada BAZNAS nantinya tidak akan sampai kepada orang yang berhak menerimanya merupakan dampak dari kurangnya menjadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kekhawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih mesjid-mesjid di lingkungannya masing-masing tempat menitipkan zakat karena selain jaraknya lebih dekat, juga masyarakat lebih mengenal pengurus mesjid dengan baik. Upaya melengkapi sarana dan prasarana yang masih minim untuk menunjang keberhasilan dalam menentukan tujuan BAZNAS Kabupaten Garut yang di

³³ Wawancara dengan Abdullah Efendi (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kab. Garut), Garut, 10 September 2021

dukung oleh Peraturan daerah dalam pengelolaan zakat, menurut Hendy Muhyidin menanggapi tentang masih minimnya sarana dan prasarana maka apa yang sudah ada dalam lingkungan BAZNAS dimanfaatkan sebaik mungkin.³⁴

Dari hasil pemaparan wawancara dan dokumentasi di atas, dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Garut terus berupaya mengembangkan program termasuk pengelolaan keuangan di tengah-tengah perubahan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal. Pencapaian kualitas laporan keuangan BAZNAS Garut ditempuh melalui pelaksanaan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kinerja pegawai yang optimal. Dalam rangka memelihara dan menunjang pengelolaan yang lebih baik untuk memenuhi standar penilaian keuangan yang sehat dan transparan. Maka terus diupayakan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih baik cepat dan terbuka, pengembangan fasilitas informasi telekomunikasi, pemantauan secara berkala, perekrutan pegawai yang selektif untuk penambahan jumlah pegawai yang cakap. Sistem pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih baik dan cepat dan bertambahnya pegawai yang cakap diharapkan mampu menunjang kelancaran proses pelaksanaan yang lebih optimal dari zakat dan infaq/sedekah tersebut. Hasil pengelolaan yang baik dan benar pada akhirnya akan mengakibatkan pula kepercayaan dari masyarakat luas Kabupaten Garut semakin meningkat.

Penerapan sistem laporan terbuka yang masih dihadapkan pada kurangnya kepercayaan, upaya maksimal pemantauan secara berkala, perekrutan pegawai yang selektif dan masih minimnya sarana prasarana penunjang tentu berdampak bahkan memunculkan permasalahan terhadap kelancaran pelaksanaan penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai dalam menggapai kualitas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif andal, relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan. Permasalahan yang bisa muncul, seperti diperolehnya hasil

³⁴ <https://baznas.garutkab.go.id>, *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi*, diakses 10 Agustus 2021

pemeriksaan akuntan publik tentang kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut selama tahun 2016-2021 pada tabel berikut:³⁵

Tabel 1.1
Hasil Akuntan Publik
Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Garut Tahun 2016-2021

Tahun	Opini
2016	Tidak diperiksa
2017	Wajar dengan paragraf penjelasan
2018	Wajar tanpa pengecualian
2019	Wajar tanpa pengecualian
2020	Belum ada hasil

(Sumber: BAZNAS Garut, Penelusuran diolah, 2021)

Data di atas menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Garut kepemimpinan periode 2016-2021, dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian secara konsisten tiap tahunnya. Hanya dua tahun saja yaitu tahun 2018, 2019, yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, artinya baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sedangkan tahun 2016 laporan keuangan tidak diperiksa dan tahun 2017 laporan keuangan mendapatkan opini wajar dengan paragraf penjelasan (dengan catatan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2016), dan tahun 2020 belum diterima hasil pemeriksaannya. Padahal kualitas laporan keuangan yang baik ditandai oleh penyajian laporan keuangan yang dapat diperbandingkan setiap tahunnya, yaitu selama tahun 2016 sampai dengan 2020 hasil pemeriksaan laporan keuangan harus memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Ahmad Hasan Ridwan, menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan profesional sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Namun kaidah atau aturan resmi sesuai dengan hukum syari'ah tidak boleh ditinggalkan. Pada dasarnya ada empat yang harus dimiliki oleh lembaga

³⁵ <https://baznas.garutkab.go.id>. Diakses 5 Juni 2021

zakat, yaitu *standard operating procedure* (SOP) yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan (*korporat*).³⁶

Oleh karena itu, sudah semestinya menjadi perhatian serius yang harus segera dilakukan oleh manajemen BAZNAS Kabupaten Garut dalam menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah SWT. QS. Al-Anfal, 8: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”³⁷

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT sudah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan mengkhianati Allah dan Rasulullah juga mengkhianati segala bentuk amanah yang dipegang. Amanah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, misalnya dalam hal penyajian laporan keuangan harus berpedoman kepada ketentuan keuangan yang sesuai dengan syari‘ah, yakni menunjukkan bukti kebenaran dalam menjalankan tugasnya melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah masyarakat luas. Amanah dengan menunjukan kinerja yang baik dan konsisten, serta saling melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas kerja pegawai sehingga mampu memperoleh kepercayaan yang terus meningkat.

Begitu pula telah menjadi kewajiban untuk menegakkan kejujuran dalam menjalankan amanahnya sebagai pengelola zakat. Firman Allah SWT. QS. Al-Ahzab [33]: 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا...

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar...”³⁸

³⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), Cetakan ke-1, 126.

³⁷ Hidayatulloh, dkk, *Mushaf*, 180

³⁸ Hidayatulloh, dkk, *Mushaf*, 427

Kandungan ayat tersebut menjelaskan Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu berperilaku baik dan jujur. Jujur yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, misalnya dalam hal konsistensi melakukan penyusunan dan penyajian data dan informasi pada laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan haruslah menunjukkan sesuatu yang telah terjadi sebenarnya (tanpa ada rekayasa) dan didukung oleh bukti transaksi yang jelas. Manajemen bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala data dan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang dilaporkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis lebih tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang **“Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut ?
2. Apakah ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut ?
3. Apakah ada pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut ?
4. Apakah ada pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut ?
5. Apakah ada pengaruh penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut
2. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut
3. Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut
4. Pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut
5. Pengaruh penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik secara akademik maupun praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menambah kerangka konseptual operasional tentang pengaruh penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai serta kualitas laporan keuangan pada bidang ilmu akuntansi syari'ah atas pendekatan hukum Islam.
 - b. Sebagai bahan studi lanjutan yang relevan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui permasalahan kualitas laporan keuangan.
2. Manfaat praktisi
 - a. Sebagai bahan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan.
 - b. Mampu memberikan kontribusi yang berguna bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Garut dalam melakukan pengkajian terhadap

pengaruh penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kinerja, dan kualitas laporan keuangan.

- c. Sebagai temuan awal untuk melakukan evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Garut dalam rangka menyajikan secara tepat waktu dan konsisten tentang laporan keuangan yang berkualitas.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan penulis dalam menyelesaikan studi Doktoral di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syari'ah.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan dan menganalisis masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti mengacu kepada kerangka pemikiran yang mencakup penggunaan *grandtheory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* yang terkait langsung dengan masing-masing variabel, sebagai berikut:

a. *Grand Theory*

Penelitian ini menggunakan *grand theory* (teori utama), yaitu teori *masalahah*. Asy-Syathibi mengartikan *masalahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *masalahah*.

Dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan, yaitu "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna kehidupannya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akliya secara mutlak."

Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *masalahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.³⁹

Kata *al- masalahah* lawan dari *al-mafsadah*, sebab *al- masalahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang di dalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk jenis *majaz mursal* hubungan

³⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Garnati asy-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, juz II (t.k: Dar al-Fikr, t.t), 16.

sebab-akibat. Maka dikatakan *at-tijarah maslahah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *talabul ilmi maslahah* (mencari ilmu itu bermanfaat). Adapun tujuan pembuatan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *maslahah al-mursalah* berarti kemaslahatan-kemaslahatan yang sejalan dengan *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).⁴⁰

Maqasid syari'ah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban tentang hukum Islam. Mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah di balik zakat. Maqasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup keburukan. Maqasid dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. Maqasid mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadilan.⁴¹ Jasser Auda menuliskan maqasid hukum Islam diklasifikasikan pada dimensi: tingkatan-tingkatan keniscayaan yang merupakan klasifikasi tradisional, jangkauan tujuan hukum untuk menggapai maqasid, jangkauan orang yang tercakup dalam maqasid, dan tingkatan keumuman maqasid atau sejauhmana maqasid itu mencerminkan keseluruhan nas.⁴²

Oleh karena itu kebahagiaan hidup di dunia tidak bisa direalisasikan kecuali dengan jalan menempuh sarana untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Oleh karena itu banyak sekali naş-naş Al-Qur'an dan kandungan makna yang lainnya menetapkan bahwa syariat Islam hadir lengkap dengan membawa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Terkait hal ini Allah SWT. telah berfirman dalam Al- Qur'an Surat Yunus, 10: 57:

⁴⁰ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, terjemah oleh Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cetakan Pertama, 313-314

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philophy of Islamic Law*, terjemah oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), Cet. I, 31-32

⁴² Jasser Auda, *Maqasid Shariah*, 33-34

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur‘an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”⁴³

Kemaslahatan umat manusia dan akhirat merupakan satu tujuan dari seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam ayat-ayat al-Quran dan sunah Rasulullah. Kemaslahatan itu ada yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan,⁴⁴ baik itu tentang jiwa, akal, keturunan, agama maupun harta. Perkembangan zaman, tempat, dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan manusia. Maka jika syariat Islam terbatas pada hukum yang ada, tentu akan mengalami kesulitan.⁴⁵

Pembangunan ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah dibangun berdasarkan prinsip tauhid dan etika serta mengacu pada tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*) merupakan perwujudan dari konsep tersebut. Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴⁶

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kinerja pegawai, dan kualitas laporan keuangan dapat pula dikategorikan ke dalam kajian fiqih muamalah, yaitu *al-ba`i at-tijarah*.

Pengertian *Al-ba`i at-tijarah*⁴⁷ menurut ulama hanafiyah,

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

⁴³ Hidayatulloh, dkk, *Mushaf*, 215

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 208

⁴⁵ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124

⁴⁶ Ridwan, *Manajemen Baitul*, 5

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-74

“pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

Menurut Imam Nawawi,

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

Menurut Ibnu Qudamah,

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.

Dari pengertian *al-ba`i at-tijarah* di atas, dapat dikatakan bahwa variabel PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kinerja pegawai, dan kualitas laporan keuangan merupakan suatu kajian perekonomian pada bidang akuntansi dan akuntansi manajemen yang membahas permasalahan kepemilikan harta benda dengan cara yang sah.

Islam sebagai ajaran yang universal memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Juhaya S. Praja menyebutkan, terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, antara lain: *la yakun dawlatan bayn al-agniya* (pemerataan dan pendistribusian kekayaan), *antaradin* (sukarela), *tabadul al-manafi'* (asas manfaat), *takaful al-ijtima'* (solidaritas sosial), *haq al-lah wa hal al-adami* (kepentingan milik bersama).⁴⁸

Berdasarkan uraian tentang permasalahan penelitian dan kemaslahatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi yakni tentang penilaian kualitas pada laporan keuangan yang disajikan. Menggunakan metode penetapan hukum *maslahah* itu merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan, kemanfaatan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan

⁴⁸ Ridwan, 17

hukum, termasuk hukum ekonomi dan ketentuan-ketentuan pengelolaan zakat. Sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Para Sahabat telah memberikan contoh teladan bahwa kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi. Sehingga jika kita hubungkan dengan kemaslahatan pengelolaan zakat itu merupakan kepentingan orang banyak, yaitu para pemberi zakat, pengurus zakat dan penerima zakat, serta dalam hal ini adalah kemaslahatan bersama atau umat secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut tentunya terdapat hubungan yang erat sekali bahwa masalah mursalah dapat mendatangkan manfaat terhadap semua pihak terkait pengelolaan zakat. Begitu pula dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan badan amil zakat yang baik dan wajar merupakan satu indikator yang sangat penting yang menunjukkan perkembangan yang baik dari badan amil zakat tersebut. Sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan dengan profesional dan benar-benar transparan, serta bersih dari segala bentuk kecurangan. Kualitas laporan keuangan yang baik menunjukkan badan amil zakat benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya hanya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat, terhindar dari kepentingan pribadi atau golongan.

Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah mencegah kerusakan, karena perhatian syari'at Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkannya lebih bedas dari perhatiannya kepada hal-hal yang diperintahkan, sebagaimana kaidah fiqih yang berlaku:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.”⁴⁹

Makna kaidah tersebut dalam penelitian ini bahwa upaya menghindari kerusakan dalam pengelolaan keuangan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari semua pihak terkait harus menjadi prioritas utama manajemen

⁴⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, terjemahan oleh Muhyiddin Mas Ridha, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 162

BAZNAS Kabupaten Garut dengan cara penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai yang lebih baik dan optimal.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh”⁵⁰

Sesungguhnya kaidah dalam sesuatu dari segi pemanfaatan adalah boleh namun pelaksanaannya harus dengan cara yang patut. Kaidah ini mencakup segala sesuatu yang tidak ada dalil khusus untuknya. Karena sesuatu yang telah ada dalil syara' yang khusus untuknya, tidak butuh pada kaidah ini untuk mengetahui hukumnya.

Makna kaidah di atas dalam penelitian ini bahwa diperbolehkannya penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai selama dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan luas bagi pengelolaan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut sehingga kualitas laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian secara konsisten setiap periode.

Adapun terkait kemaslahatan dalam zakat, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya QS. At-Taubah, 9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁵¹

Ayat di atas menegaskan bahwa zakat sangat penting bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Zakat merupakan satu kewajiban yang harus ditegakkan, bahkan bagi seorang muslim yang sudah mampu akan tetapi tidak mengeluarkan zakat merupakan salah satu tindakan pelanggaran seorang muslim terhadap perintah Allah SWT. Karena dalam zakat telah dijanjikan oleh Allah

⁵⁰ Zaidan, *Al-Wajiz*, 287.

⁵¹ Hidayatulloh, dkk, *Mushaf*, 203

SWT untuk ketentraman jiwa yang merupakan salah satu indikator yang harus terpenuhi sebagaimana maksud *masalahah*, yaitu mencapai kemasalahatan baik bagi pengeluar zakat maupun penerima zakat.

b. Middle Theory

Beberapa teori turunan terkait *grandtheory masalahah* yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya, *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*, dan *Syari'ah Enterprise Theory*.

Pemikiran tentang bagaimana adanya perbedaan informasi atasan dan bawahan atau antara kantor pusat dan kantor cabang atau adanya informasi asimetri yang mempengaruhi penggunaan sistem akuntansi merupakan dasar pemikiran dari teori agensi/keagenan.⁵² Asumsi teori agensi/keagenan mengungkapkan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh dari kondisi lingkungan, bahwa prinsipal adalah *risk-neutral* dan agen adalah *risk andeffort averse*. Motivasi terhadap agen dan prinsipal diasumsikan adalah kepentingannya sendiri dan sering kepentingan antara keduanya berbenturan.⁵³ Teori ini menghasilkan biaya keagenan yang merupakan pengorbanan yang muncul akibat dari hubungan keagenan termasuk hubungan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.

Jansen and Meckling menyebutkan tentang hubungan keagenan dengan definisi “*an agency relationship as a contract under which one or more person (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the*

⁵² Shield, M.D, S. M. Y. (1993). “*Budget Use and Managerial Performance. Budget Use and Managerial Performance*”, *Journal of*, 265–280, dalam Fiane Rina Sambuaga, dkk, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi*, (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Keerom)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan daerah*, Vol. 5 No. 1, April 2020, 105-124

⁵³ Leslie and Kren. (1997). “*The Role Of Accounting Information in Organizational Control*. New York: Behavioral Accounting Research”. dalam Fiane Rina Sambuaga, dkk, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi*(Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Keerom), *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan daerah*, Vol. 5 No. 1, April 2020, 105-124

agent".⁵⁴ Definisi tersebut memiliki pengertian tentang hubungan keagenan yang merupakan sebuah kontrak dalam bentuk pendelegasian wewenang untuk pembuatan keputusan yang diberikan oleh pihak pemilik (*principal*) kepada pihak perusahaan atau organisasi (*agent*). Teori ini berkaitan dengan amanah yang diterima dari pihak pemberi zakat untuk dapat didistribusikan dengan sebenarnya dan dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait dalam bentuk laporan keuangan yang baik dan wajar.

Steward Theory merupakan teori yang dibangun berdasarkan pada asumsi filosofis tentang hakekat sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertanggung jawab, dan memiliki kejujuran. Teori *stewardship* juga memandang adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik.

Danalsan dan Davis menyatakan teori *stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behaviour*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peran penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah kepada sikap melayani (*steward*). Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi di mana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). Teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga funi utilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.⁵⁵

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syaria'ah. Informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syaria'ah yang bermanfaat bagi

⁵⁴ Arif Anggyansyah, *Teori Keagenan (Agency Theory)*, anggyansyah.blogspot.com, 2013, 11, diakses 8 September 2021

⁵⁵ Arfan Ikhsan & Herkulanus Bambang Suprpto, *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 84

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka merupakan tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum.⁵⁶

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah ketika BAZNAS mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syari'ah. Penyajian laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi syari'ah, sistem informasi akuntansi yang berjalan dengan baik, sistem pengawasan, pengendalian internal dan kinerja pegawai yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan benar sebagai bentuk pertanggungjawabannya. *Stewardship* dapat meningkatkan usaha dan kepercayaan yang terus naik, dan akan mampu memuaskan semua pihak terkait, sebab sebagian besar *stakeholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kepercayaan yang diraih organisasi. Oleh karena itu termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan terhadap semua pihak terkait pelaporan keuangan BAZNAS.

Syari'ah enterprise theory menurut Triyuwono yang menyatakan bahwa akuntansi syari'ah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. *Syari'ah enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, utamanya kepada Allah SWT.⁵⁷ Slamet menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang menjadi dasar setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah bagian amanah dari Allah SWT yang tentunya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.⁵⁸

⁵⁶ Wibisana, dkk, *Pernyataan*, 101.2

⁵⁷ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 355

⁵⁸ Triyuwono, *Akuntansi*, 356

Syari'ah enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders, stakeholders, masyarakat, dan lingkungan alam* tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. Karena distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga kepada pihak lain yang terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu,⁵⁹

Implikasi teori *syari'ah enterprise* pada penelitian ini di mana BAZNAS harus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berlandaskan *syari'ah enterprise theory* karena badan amil zakat tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Penerapan prinsip *syari'ah enterprise theory* pada badan amil zakat akan membuat aktivitas pengelolaan yang lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pemahaman standar keuangan syari'ah dan penerapan pengawasan kinerja yang tidak bertentangan dengan syari'ah sangat memungkinkan badan amil zakat memperoleh kategori laporan keuangan yang baik dan opini wajar tanpa pengecualian secara konsisten.

c. *Applied Theory*

Adapun teori yang digunakan sebagai teori aplikatif dalam penelitian ini antara lain konsep/teori tentang akuntansi, akuntansi syari'ah, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kinerja pegawai, dan laporan keuangan.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. Pada penerapannya, akuntansi tidaklah mutlak melainkan dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi di setiap entitas berbeda-beda. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola

⁵⁹ Triyuwono, *Akuntansi*, 357

transaksi keuangan. Oleh sebab itu, setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada PSAK.⁶⁰ Sedangkan akuntansi syari'ah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif Al-Qur'an (khususnya QS Al-Baqarah [2]: 282) dalam bentuk yang lebih konkrit. Dengan langkah deviasi ini, maka perintah normatif untuk melakukan pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan baik pada tataran praktis. Dengan demikian akuntansi syari'ah merupakan bagian tak terpisahkan dari trilogi iman (*faith*), ilmu (*knowledge*), dan amal (*action*). Artinya wujud keberimanan seseorang harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan (amal atau aksi). Di mana perbuatan tadi harus didasari dan dituntun oleh ilmu (dalam hal ini adalah ilmu sosial profetik, yaitu akuntansi syari'ah).⁶¹ Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah berhubungan dengan karakteristik akuntansi syari'ah yang terdapat dalam SAK Syari'ah. Maka seharusnya hal ini dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya proses laporan keuangan, terutama oleh pihak manajemen dan pemakai informasi laporan keuangan.⁶² Jadi setiap laporan keuangan harus mengacu kepada PSAK yang berlaku pada jenis perusahaan/oragnisasi tertentu. Dalam hal ini kualitas laporan keuangan Badan Amil Zakat harus mengacu kepada PSAK 109 tentang akuntansi zakat infak sedekah.

Sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto adalah bagian sistem informasi akuntansi terdiri dari: *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), *brainware* (manusia), *procédure* (prosedur), *data base* (basis data), *comunication network* (jaringan komunikasi).⁶³ Laporan keuangan dan laporan internal seperti daftar umur piutang, anggaran, dan proyeksi arus kas merupakan hasil akhir dari sebuah sistem informasi akuntansi biasanya berupa.⁶⁴ Jadi penggunaan sistem informasi akuntansi yang berjalan baik dan optimal dapat berdampak terhadap kualitas laporan keuangan.

⁶⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 4

⁶¹ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 13

⁶² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2014), 5

⁶³ Susanto, *Sistem*, 78

⁶⁴ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2012), 16-17

Pengendalian internal dengan model COSO. Model *Committee of Sponsoring Organizations Commission* (COSO) memiliki cakupan yang lebih luas terdiri atas lima model, yaitu: lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas/kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.⁶⁵ Model pengendalian intern ini menetapkan pengendalian intern sebagai proses yang diterapkan oleh dewan direktur, manajemen, dan agar dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan pengendalian berikut ini dapat dicapai, yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, daya andal pelaporan keuangan, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.⁶⁶ Dengan demikian, pengendalian internal yang sesuai dengan model tersebut di atas dapat berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Konsep kinerja pegawai menurut Bernardian dan Russell dalam Sedarmayanti, "*performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during a specific time period*". Kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai *outcome* yang dihasilkan dari suatu kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu pula. Hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar target, sasaran, kriteria yang ditentukan dan disepakati bersama disebut kinerja karyawan.⁶⁷ Amstrong dan Baron menyebutkan tentang faktor yang dapat menimbulkan karyawan memiliki kinerja baik antara lain: *personal factors* ditentukan oleh tingkat keterampilan, kompetensi, motivasi, komitmen individu; *leadership factors* ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan manajer; *team factors* ditunjukkan oleh kualitas dukungan rekan kerja; *system factors*, ditunjukkan adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi, *contextual/situational factors*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal eksternal.⁶⁸

⁶⁵ Mayangsari dan Wandanarum. *Pendekatan*, 59.

⁶⁶ Krismiaji, *Sistem*, 167

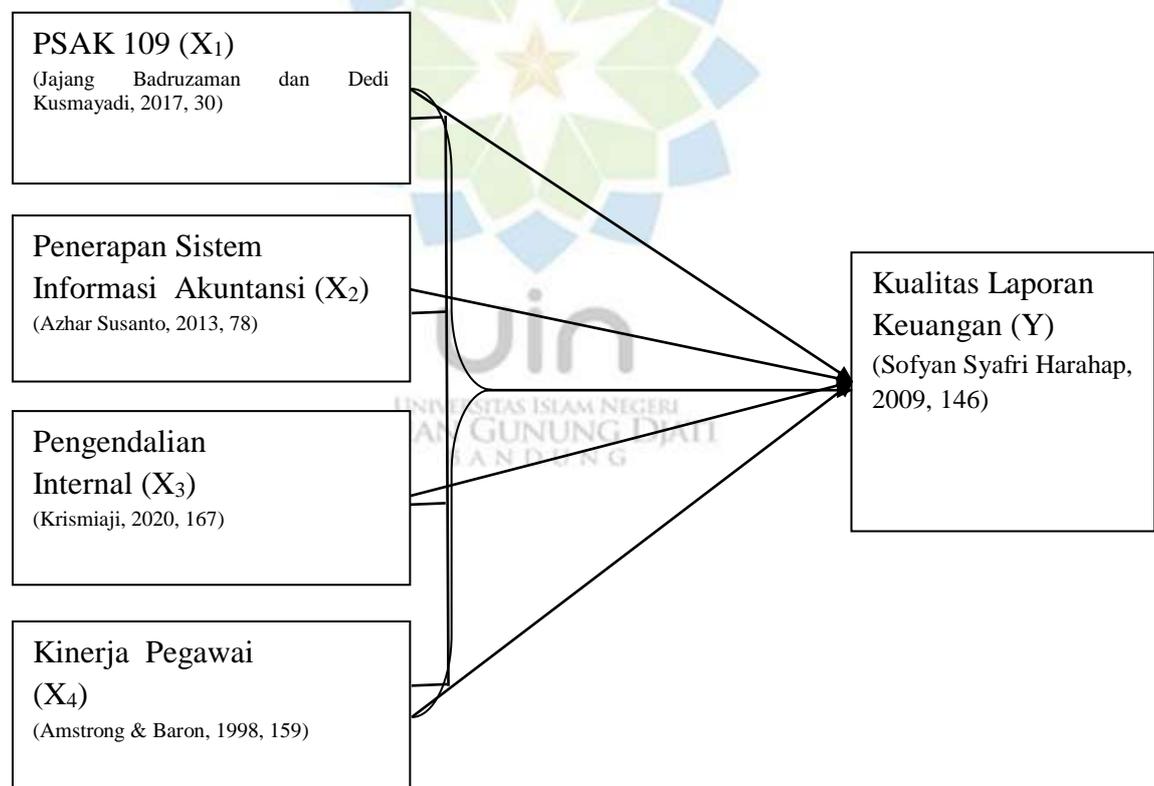
⁶⁷ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 263

⁶⁸ Wibowo, *Manajemen*, 84

Laporan keuangan merupakan hasil tahapan akuntansi yang bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu organisasi/instansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau kegiatan organisasi/instansi tersebut.⁶⁹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2015 No. 1 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Paragraf 45 sampai 63 bahwa laporan keuangan yang telah terstandarisasi memiliki ciri-ciri kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.⁷⁰

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka secara ilustratif, hubungan antar kelima variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



(Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2021)

⁶⁹ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1999), 55

⁷⁰ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 85

F. Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan PSAK 109 terhadap kualitas laporan keuangan;
 H_a : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan:
 $H_0 : \beta_{Y.1} = 0$
 $H_a : \beta_{Y.1} > 0$
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan;
 H_a : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan:
 $H_0 : \beta_{Y.2} = 0$
 $H_a : \beta_{Y.2} > 0$
3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan;
 H_a : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan:
 $H_0 : \beta_{Y.3} = 0$
 $H_a : \beta_{Y.3} > 0$
4. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan;
 H_a : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan :
 $H_0 : \beta_{Y.4} = 0$
 $H_a : \beta_{Y.4} > 0$
5. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai terhadap kualitas

laporan keuangan ;

Ha : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan :

$H_0 : f_{Y.1234} = 0$

$H_a : f_{Y.1234} > 0$

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, diketahui terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti variabel-variabel penelitian dan objek yang memiliki kesamaan, antara lain:

Pertama, Mohamad Roni, Lalu Hamdani Husnan, dan Nur Fitriah, dalam penelitian yang berjudul *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel rekonsiliasi juga tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.⁷¹

Kedua, Berry Wan Saputra, dalam judul penelitian, *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Pekanbaru)*. Hasil penelitian menunjukkan variabel implementasi standar akuntansi pemerintah (X1) memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan hasil t-hitung 2,701 yang lebih besar dari t-tabel 2,021. Variabel implementasi sistem informasi akuntansi (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan hasil t-hitung (-0,119) yang lebih besar dari t-tabel 2,021. 3. Variabel implementasi

⁷¹ Mohamad Roni, Lalu Hamdani Husnan, dan Nur Fitriah, "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kantor Negara Mataram", *Jurnal Akuntansi Aktual* Vol. 3, No.2, Juni 2015, 175-187

sistem pengendalian internal (X3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan t-hitung 2,914 lebih kecil dari t-tabel 2,021.⁷²

Ketiga, Nurendah Ragillita Untary dan Moh Didik Ardiyanto, dalam penelitian *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Faktor Eksternal sebagai Pemoderasi*. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Faktor eksternal disimpulkan tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.⁷³

Keempat, Nur Laila Yuliani dan Rahmawati Dwi Agustini, dengan judul penelitian *Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Hasil penelitian menyatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.⁷⁴

Kelima, Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati, dalam penelitian *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern,*

⁷² Berry Wan Saputra, "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Pekanbaru)", *JOM. FEKON*, Vol.2, No.2, Oktober 2015, 1-15

⁷³ Nurendah Ragillita Untary dan Moh Didik Ardiyanto, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Faktor Eksternal sebagai Pemoderasi", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015, 1-11

⁷⁴ Nur Laila Yuliani dan Rahmawati Dwi Agustini, "Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vo. 14, No. 1, April 2016, 56-64

Pemahaman Basis Akruwal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.⁷⁵

Keenam, Ali Muktiyanto, dengan judul penelitian *Good University Governance dan Kinerja Program Studi: Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen, Teknik Manajemen, dan Pilihan Prioritas Strategi Sebagai Model Mediasi Fit.* Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hubungan GUG dan kinerja dipengaruhi oleh penerapan akuntansi manajemen, penerapan teknik manajemen, dan pilihan prioritas sebagai mediasi model fit.⁷⁶

Ketujuh, Irzal Tawaqal dan Suparno, dalam penelitian *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.⁷⁷

⁷⁵ Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruwal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16.2. Agustus (2016), 1290-1318

⁷⁶ Ali Muktiyanto, "Good University Governance dan Kinerja Program Studi: Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen, Teknik Manajemen, dan Pilihan Prioritas Strategi Sebagai Model Mediasi Fit", *Disertasi*, (Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2016), t.d.

⁷⁷ Irzal Tawaqal dan Suparno, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.2, No.4, (2017), 125-135

Kedelapan, Aditya Achmad Fathony dan Ima Fatimah, dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung*. Penelitian ini berusaha mengkaji seberapa jauh pemanfaatan UU no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Dana Zakat yaitu PSAK 109 dan kaitannya dengan Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Pusat Zakat Umat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan survey yaitu dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada para amil di Lembaga Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung. Hasil survey pada Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah mulai menerapkan PSAK 109 dan UU no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam praktek akuntansi dan pengelolaan zakatnya. Penerapan ini mempengaruhi akuntabilitas publik Lembaga Amil Pusat Zakat Umat secara positif.⁷⁸

Kesembilan, Erika Amelia, dalam penelitian yang berjudul *Peran Auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa peran auditor internal, auditor eksternal, dan DPS dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan BPRS, namun pemahaman SAK Syari'ah tidak dapat mempengaruhi secara signifikan peran auditor internal, auditor eksterna, dan DPS dalam upaya menjaga kualitas laporan keuangan BPRS, hal ini menunjukkan bahwa jika auditor internal, auditor eksternal, dan DPS memahami SAK Syari'ah, maka laporan keuangan BPRS akan berkualitas dalam perspektif akuntansi syari'ah.⁷⁹

Kesepuluh, Nurul Lathifah, penelitian yang berjudul *Perancangan Sistem AZIS (Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Menghasilkan Laporan Keuangan*. Dengan menggunakan pendekatan

⁷⁸ Aditya Achmad Fathony dan Ima Fatimah, "Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung", *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 8, No. 1, Januari-April 2017, 10-21

⁷⁹ Erika Amelia, "Peran Auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan dalam Perspektif Akuntansi Syariah", *Disertasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1439 H/2018 M), t.d.

kualitatif deskriptif studi kasus, peneliti mencoba untuk menerapkan PSAK No.109 dalam proses penyusunan laporan keuangan zakat dan infaq Organisasi Pengelola Zakat dengan merancang sebuah sistem informasi akuntansi yang meliputi rancangan struktural proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi dan pengelompokan transaksi, kebijakan akuntansi, kode rekening (*chart of account*) yang digunakan, jurnal transaksi, buku besar. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas.⁸⁰

Kesebelas, Sailendra, dengan judul penelitian *Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Trusted Laporan Keuangan yang Dimoderasi oleh Relevansi Nilai*. Hasil penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa *corporate governance* dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *trusted* laporan keuangan. Begitu pula dengan relevansi nilai, memperkuat pengaruh *corporate governance* terhadap *trusted* laporan keuangan. Namun demikian, relevansi nilai sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh kualitas audit terhadap *trusted* laporan keuangan.⁸¹

Keduabelas, Silvia Almar'atus Sholohah, Ardiyani Ika Sulityawati, dan Aprih Santoso, dalam penelitian *Kualitas Laporan Keuangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Hasil penelitian menyimpulkan hipotesis yang menyatakan penerapan *Good Government Governance*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, ditolak. Hipotesis menyatakan bahwa penerapan pengawasan berpengaruh

⁸⁰ Nurul Lathifah, "Perancangan Sistem AZIS (Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Menghasilkan Laporan Keuangan", *jurnal Akuntansi: Akuntansi Integratif*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019, 42-66

⁸¹ Sailendra, "Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Trusted Laporan Keuangan yang Dimoderasi oleh Relevansi Nilai", *Disertasi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019), t.d.

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah DPKAD Kota Semarang, diterima.⁸²

Ketigabelas, Reny Aziatul Pebriani, dalam penelitian yang berjudul *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi*. Hasil penelitian bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran Audit Internal secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas LKPD, namun secara parsial penerapan SAP tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian secara moderasi variabel peran audit internal yang dimoderasi oleh SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.⁸³

Keempatbelas, Marisa Eka Pangestu, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Arif Hartono, dalam judul penelitian *Pengaruh Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Hasil penelitian bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan system pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.⁸⁴

Kelimabelas, Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, judul penelitian *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Hasil menunjukkan bahwa Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan.⁸⁵

Keenambelas, Fiane Rina Sambuaga, Adolf Z.D. Siahay, dan Sayaikhul Falah, dalam penelitian *Pengaruh Sistem Pengendalian internal Terhadap*

⁸² Silvia Almar'atus Sholohah, Ardiyani Ika Sulityawati, dan Aprih Santoso, "Kualitas Laporan Keuangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya". *Indonesia Accounting Journal*, Vol. 1, No. 2, tahun 2019, 45-56

⁸³ Pebriani, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol. 10 No. 1, Juli 2019.

⁸⁴ Pangestu, dkk, "*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern*", 108-119

⁸⁵ Lestari dan Dewi, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi", 170-178

Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Keerom). Hasil penelitian menyatakan Sistem kontrol pada elemen lingkungan kontrol tidak berpengaruh dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, elemen kegiatan kontrol memiliki dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi lingkungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil terbalik menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak dapat memoderasi kontrol internal kualitas laporan keuangan.⁸⁶

Ketujuhbelas, Nurlinda, dengan judul penelitian *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Hasil penelitian menemukan bahwa, penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Proses manajemen risiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, setelah di moderating oleh variabel komitmen manajemen, begitu juga dengan komitmen manajemen memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel komitmen manajemen mampu memperkuat pengaruh proses manajemen risiko terhadap kualitas laporan keuangan.⁸⁷

Kedelapanbelas, Ratna Widyatami dan Siti Nurlatifah, dalam penelitian yang berjudul *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Zakat, Infaq, dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 109 pada LAZISNU Bekasi*. Hasil penelitian dapat disimpulkan LAZISNU Kabupaten Bekasi belum menerapkan PSAK pada data keuangannya karena belum mencakup laporan posisi keuangan, laporan

⁸⁶ Sambuaga, dkk, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, 105-124

⁸⁷ Nurlinda, "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara", *Disertasi*, (Medan: Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2020),t.d.

perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan , laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁸⁸

Kesembilanbelas, Eli Kurniawati dan Noor Shodiq Askandar, dalam penelitian *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil pengujian secara simultan variabel Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hasil pengujian secara parsial variabel Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.⁸⁹

Kedua puluh, Efri Agihidayantari dan Putu Sukma Kurniawan, dalam penelitian *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan dana zakat, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan dana zakat, dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan dana zakat.⁹⁰

Kedua puluh satu, Muhammad Apep Mustofa dan Najibullah, dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Penerapan Teknologi dalam Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris: Pada Pt. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Daerah)*. Berdasarkan hasil uji f diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2

⁸⁸ Ratna Widyatami dan Siti Nurlatifah, “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Zakat, Infaq, dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 109 pada LAZISMU Bekasi”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vo. 7, No. 2 (Mei-Agustus 2020), 50-67

⁸⁹ Eli Kurniawati dan Noor Shodiq Askandar, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, *Jurnal E-JRA*, Vol.9, No.8, Agustus 2020, 1-16

⁹⁰ Efri Agihidayantari dan Putu Sukma Kurniawan, “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat”, *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.9, No.2, Oktober 2020, 81-89

secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $24,784 > F$ tabel 3,06, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara Sistem Informasi Akuntansi dan pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan yaitu berarti terdapat pengaruh variabel bebas X1 dan variabel bebas X2 secara simultan terhadap variabel Y.⁹¹

Kedua puluh dua, Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, Elis Murhasanah, dalam judul penelitian *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan dalam penelitian yaitu divisi keuangan, divisi penghimpunan dan divisi penyaluran BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara, reduksi data, analisis data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak sesuai. Ada beberapa bagian yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada. Mulai dari pengakuan yang belum sesuai dengan PSAK 109, seperti pengakuan dana non halal, pemisahan antara kas dana zakat, infaq, dan sedekah, kurangnya kebijakan terkait dengan pengungkapan dana zakat, infaq, dan sedekah, serta kurang sempurnanya penyajian laporan keuangan yaitu tidak adanya laporan perubahan dana non halal.⁹²

Dari beberapa penelitian sebelumnya itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, tetapi memiliki juga perbedaan dari penekanan pada variabel PSAK 109, sistem informasi

⁹¹ Muhammad Apep Mustofa dan Najibullah, "Pengaruh Penerapan Teknologi dalam Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris: Pada Pt. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Daerah)", *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol. 1, No.2, 148-156

⁹² Rokib, dkk, Analisis Penerapan PSAK 109, 99-109

akuntansi, pengendalian internal, kinerja pegawai, kualitas laporan keuangan, dan lokasi penelitian yang dilaksanakan di BAZNAS. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang disajikan di atas, penelitian ini diyakini memiliki originalitas dengan tetap mengakomodasi hasil-hasil penelitian tersebut sebagai kerangka acuan dan konseptualisasi model penelitian. Dengan demikian, selain akan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan konsep/teori kualitas laporan keuangan dengan pendekatan yang lebih relevan terhadap kaidah-kaidah hukum Islam tentang pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional. Adapun kekurangan penelitian ini dari sudut pandang lokasi penelitian di tingkat Kabupaten, maka harapannya dapat membuka peluang bagi penelitian berikutnya tentang pengaruh penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS di tingkat yang lebih luas lagi, yaitu: tingkat provinsi maupun nasional.

H. Opeasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen, sedangkan penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai sebagai variabel independen.

Pertama PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Standar akuntansi ZIS sesungguhnya mempunyai peraturan tersendiri dengan memperhatikan sifatnya, standar akuntansi meliputi bagaimana harta dinilai dan diukur. Standar akuntansi zakat secara umum akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan atau aset, aktiva tetap tidak kena zakat, *nisab* (batas jumlah). Akuntabilitas lembaga pengelola zakat harus ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, agar bisa

disahkan sebagai lembaga resmi, dengan menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Hal ini menandakan bahwa standar akuntansi zakat mutlak diperlukan, karena itu dalam PSAK No. 109 akuntansi ZIS bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.⁹³

Kedua sistem informasi akuntansi yang mempunyai pengertian sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi untuk memperoleh informasi keuangan yang dibutuhkan dalam penyusunan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan.⁹⁴

Ketiga, pengendalian internal adalah satu kesatuan prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk melindungi harta atau kekayaan perusahaan dari segala jenis penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.⁹⁵ Model *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) terdiri dari lima unsur pokok sistem pengendalian intern yaitu: lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas/kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.⁹⁶

Keempat, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi beretik.⁹⁷ Menurut Noor mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif antar pegawai, pemimpin dan organisasi, melalui

⁹³ Jajang Badruzaman dan Dedi Kusmayadi, *Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109)*, (Tasikmalaya: LP2M-PMP, 2017), 30

⁹⁴ Lilis Puspita dan Dewi Sri Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 57

⁹⁵ Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Gava Media, 2019), cetakan I, 13

⁹⁶ Sekar Mayangsari dan Puspa Wandanarum. *Pendekatan Sektor Publik dan Privat, Buku I*, (Jakarta: Media Bangsa, 2013), 59.

⁹⁷ Sinambela, L.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2016), 480

pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, standar kompetensi yang disetujui bersama.⁹⁸

Kelima, kualitas laporan keuangan adalah suatu data dan informasi yang dapat memudahkan pengguna dan pembaca dalam memahami dan dapat diasumsikan sebagai pengetahuan yang memadai tentang suatu aktifitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta informasi dengan ketekunan yang alami.⁹⁹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1 dan KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) Paragraf 45 sampai 63 menuliskan bahwa laporan keuangan yang telah terstandarisasi memiliki ciri-ciri kualitatif pokok yang membuat laporan informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi pengguna. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian operasionalisasi variabel penelitian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan suatu perusahaan/organisasi yang dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan itu dapat dipengaruhi oleh faktor penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kinerja pegawai entitas/perusahaan/organisasi yang bersangkutan.

⁹⁸ Noor J., *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), edisi 1, 270

⁹⁹ Winna Roswinna, *Kualitas Laporan Keuangan, Dilengkapi dengan Hasil Penelitian pada Lembaga Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 108

¹⁰⁰ Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep*, 85